

Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia

Abdul Wahab

UIN Alauddin Makassar
abdulwahab@uin-alauddin.ac.id

Qarina

UIN Alauddin Makassar
qarina@uin-alauddin.ac.id

Alim Syariati

UIN Alauddin Makassar
alim.syariati@uin-alauddin.ac.id

Muh Dwi Aprinandhi

UIN Alauddin Makassar
muhdwiaprinandhy@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the construction of macroeconomic variables and the level of financial inclusion in Indonesia. The variables in this study are the Gini ratio, poverty, economic growth (GDP), and the open unemployment rate as independent variables and financial inclusion as the dependent variable. The analysis technique is in the form of panel data regression using the best model of the three panel data regression models, namely the common effect model, fixed effect model, and random effect model. The model chosen based on the results of the Hausman test and Chow test is a random effect model. The value of the coefficient of determination is 21.6%. By using a random effects model that was processed using the Eviews 12 program, the results obtained that the Gini ratio variable had a positive and insignificant effect on financial inclusion, the percentage of poor variable had a negative and significant effect on financial inclusion, the variable economic growth (GDP) had a positive and significant effect on financial inclusion, The open unemployment rate variable has a negative and significant effect on financial inclusion.

Keywords: *Gini Ratio, Poor Resident, Economic Growth (GDP), Open Unemployment Rate and Financial Inclusion.*

A. PENDAHULUAN

Pasca kemelut *finance* global pada tahun 2008 di beberapa negara di dunia, isu inklusi keuangan menjadi perbincangan hangat di berbagai pertemuan petinggi negara, yakni G20, Asia-Pasifik, Kerjasama Ekonomi (APEC), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan *Alliance for Financial Inclusion* (AFI). Fenomena krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga bagi banyak

negara untuk menjaga pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam mencapai stabilitas makroekonomi (Brilianto, 2011).

Krisis keuangan tahun 2008-2010, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 09 2016 terkait dengan peningkatan keuangan yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dengan pedoman kekeluargaan, efisiensi, nilai, pemeliharaan, informasi formal, dukungan peluang dan keseimbangan, kestabilan moneter, struktur keuangan yang sehat dan mendalam diperlukan menghadapi risiko, baik dalam maupun luar negeri (Konstitusi, 2016).

Forum G20 mencapai keputusan bersama dari upaya untuk mengatasi penyatuan terkait inklusi keuangan suatu negara dengan mengkonsolidasikan standar untuk kemajuan keuangan, khususnya prinsip inklusif keuangan inovatif yang menggabungkan kepemimpinan, keragaman, perlindungan, pemberdayaan, kolaborasi, dan kerangka kerja. (Larasasati & Natasya, 2017), menyatakan bahwa pemahaman dari pertemuan G20 memicu percakapan dunia yang berbeda dan menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas keuangan yang dikonsolidasikan ke dalam program-program yang berhubungan dengan pemikiran terkait inklusi keuangan, misalnya CGAP, Perbankan Dunia, Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, *Asia Development Bank*, *Financial Inclusion Coalition*, yang bergabung dengan badan pembuat standar seperti *Bank for International Settlements and Action Task Force*, *Financial Testing Activity*, serta negara-negara agraris, termasuk Indonesia (GPFI, 2020).

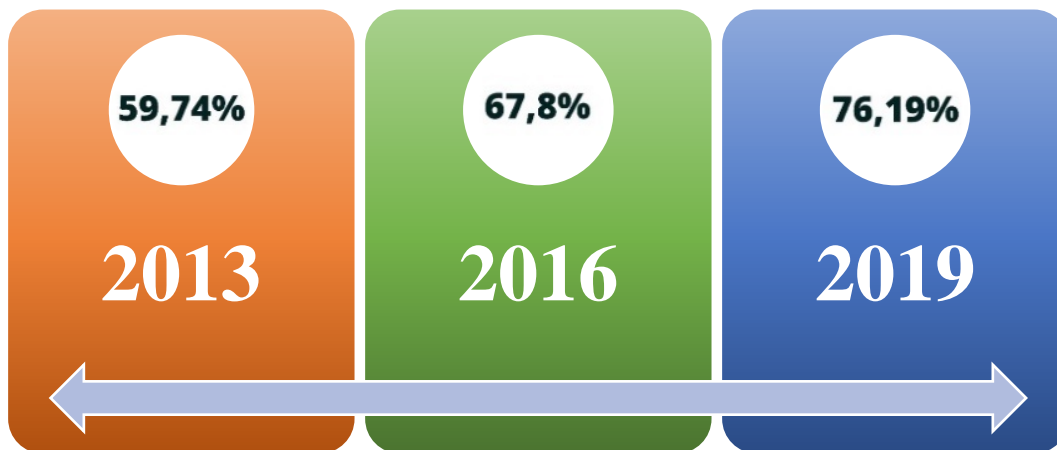
Kemajuan produk dan organisasi keuangan di Indonesia telah menjadi kebutuhan penting bagi era digital dan aksesibilitas ini menjunjung tinggi individu ataupun kelompok untuk membuat berbagai transaksi keuangan, baik yang bersifat produksi maupun konsumsi. Kedua, akses keuangan memungkinkan transaksi terjadi dengan cepat sehingga bertekad untuk meningkatkan volume transaksi keuangan (Bank Indonesia, 2021).

Bank Indonesia bersama dengan Kelompok Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Badan Kebijakan Anggaran Kementerian Keuangan telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai salah satu cara untuk menghadapi kontemplasi terkait akses keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan kerangka kerja terkait inklusi keuangan, ada 6 fokus pendukung yang menjadi pondasi agar masyarakat dapat mengetahuinya, pertama adalah pedoman keuangan, yang kedua lembaga keuangan publik, yang ketiga adalah penyebaran informasi terkait keuangan, yang keempat adalah metodologi atau bantuan pendukung, yang kelima adalah kantor perantara. Tujuan dari sistem inklusi

keuangan adalah untuk menjadikan kemajuan besar pada sektor ekonomi, meniadakan kemiskinan, dan menstabilkan keuangan. Berdasarkan studi yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu terus

Wilayah	2018	2019	2020
DKI Jakarta	0,649	0,652	0,655
Banten	0,521	0,523	0,525
Jawa Barat	0,460	0,462	0,465
Bali	0,400	0,411	0,412
Jawa Tengah	0,392	0,395	0,398

berkembang dari 2013, 2016 dan 2019.



Gambar 1. Indeks Inklusi Keuangan Indonesia

Tabel 1. Tingkatan 5 Besar Indeks Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Diolah 2022

Merujuk dari data tabel tersebut, tarif bea masuk keuangan inklusif di Indonesia lebih rasional dan terfokus di pulau Jawa, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang mendasar dan tidak memihak agar berbagai daerah memiliki perkembangan yang sama dalam pertimbangan keuangan.

Selanjutnya, ada dua kendala dalam inklusi keeuangan yang didapatkan oleh setiap daerah di Indonesia. Pertama adalah penerimaan otoritatif atau barang transaksi keuangan. Kemudian yang kedua

adalah tentang hasil dari produk keuangan itu sendiri, belum memiliki pilihan untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan lokal yang saat ini tidak memiliki bank (Nugroho & Purwanti, 2018).

Kendala lainnya adalah ukuran organisasi perbankan yang dapat dijangkau di Indonesia masih terbatas di wilayah metropolitan, sehingga kombinasi terkait akses keuangan belum sepenuhnya digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Ang (2010), yang berpendapat bahwa kemajuan keuangan di India dapat mengurangi kesenjangan, dengan alasan bahwa perkembangan pengaturan tempat kerja bank yang lebih menyeluruh yang dipelopori oleh otoritas publik India antara 1977-1990 dapat secara umum menjelaskan masuknya orang miskin ke lingkaran formal yang berhubungan dengan keuangan formal. Sementara yang terjadi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan data OJK (2017), penyebaran ATM dan cabang di Indonesia masih timpang. Cabang ATM di Indonesia memang belum bisa menjangkau daerah yang jauh mengingat 65% ATM dan 51% cabang masih berpusat di pulau Jawa (Ozili, 2020).

Isu yang menyertainya adalah bahwa meskipun *financial pooling* stabil, tingkat kemampuan terkait literasi keuangan di Indonesia masih rendah, sehingga orang tidak sepenuhnya memahami organisasi keuangan saat ini. Penelitian melalui Carpena et al (2011), menunjukkan bahwa kapasitas keuangan mempengaruhi pengetahuan dan perilaku individu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan formal dan pemanfaatan instrumen administrasi keuangan yang pada umumnya berbeda pada periode baru ini (Clara SB & Krisnawati, 2020).

Senada yang ditunjukkan oleh OJK (2017), tingkat kemampuan keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 masih rendah, hanya 29,66% dari 100 orang, sekitar 30 orang dengan kualitas persiapan yang baik. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh data Bank Dunia (2011), dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang bersebelahan, misalnya Malaysia dengan 66%, Thailand 73% dan Singapura 98%, tingkat financial limit di Indonesia terbilang rendah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Indonesia dinilai belum memiliki data yang memadai tentang cara terbaik untuk mengumpulkan uang untuk persiapan yang bermanfaat. Demikian juga, individu secara keseluruhan juga membutuhkan pemahaman tentang berbagai hal dan organisasi terkait uang yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan formal dan lebih tertarik dengan manfaat berbagai teori yang dapat merugikan mereka. Konsekuensinya, produk dan organisasi keuangan harus layak dan terdepan, sehingga ketimpangan upah belum sepenuhnya hilang (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Keuangan inklusif tidak terbatas pada data, informasi, keterampilan, dan kepercayaan pada lembaga keuangan, produk, dan organisasi, tetapi juga cara menjawab dan kecenderungan dalam

memengaruhi juga bagian pencapaian keuangan inklusif. Efek samping dari ini akan diikuti oleh pengakuan bantuan pemerintah terdekat. Pola pikir dan perilaku keuangan yang cerdas tercermin dalam kemampuan seseorang untuk menentukan tujuan keuangan, menyiapkan rencana keuangan, mengawasi aset, dan mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Orang-orang di negara-negara maju memiliki akses yang lebih tinggi dibandingkan terbelakang, tetapi ini tidak berlaku dengan orang-orang di negara-negara berkembang dan belum dewasa. Perbedaan ini membuat pemenuhan finansial menjadi perbedaan antar negara. Pakar publik di setiap negara negara mencoba untuk meningkatkan pengumpulan keuangan di antara orang-orang. Ada yang melakukannya dengan hasil yang luar biasa, dan ada pula yang menghadapi berbagai hambatan, hal ini juga dirasakan oleh Indonesia.

Segmentasi Levine (2012), tingkat otoritas, industri, dan keluarga, serta koneksi lintas negara, ditekankan bahwa secara keseluruhan ada hubungan positif antara aktivitas, pelaksanaan sistem terkait akses keuangan, dan perputaran uang. Selain itu, penelitian oleh Cheng dan Degryse (2012) juga menunjukkan bahwa peningkatan di bidang terkait keuangan, khususnya di bidang moneter, dapat menopang perputaran uang, membuat perbaikan untuk mencapai organisasi keuangan, sehingga orang dapat menggunakannya untuk membangun tingkat pendapatan mereka. melalui kredit dari bank yang berhubungan dengan akses keuangan bukan bank juga dimanfaatkan untuk persiapan penting (Lionardo & Rahmayanti, 2019).

Landasan segi mikro, transaksi keuangan yang memikat dapat membuat pekerjaan dan membuka jalan masuk yang diharapkan bagi orang-orang untuk membangun kompensasi mereka. Pada tingkat makroekonomi, berbagai transaksi keuangan telah menambah peningkatan kemajuan ekonomi publik dan sekitarnya (Andrianaivo & Kpodar, 2012).

Partisipasi kuangan bank dalam PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yang selalu mengalami penyusutan pada tahun 2018 dan 2020 menunjukkan bahwa industri keuangan perbankan di Indonesia masih butuh perhatian baik dari pemerintah agar pertumbuhan kontribusi keuangan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Sebagaimana persentase data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Pada Tahun 2017-2021 (Statistik, 2021).

Tabel 1. Kontribusi Perbankan Terhadap PDB Tahun 2017-2021

Tahun	PDB Indonesia (%)
--------------	--------------------------

2017	5,47
2018	4,17
2019	6,61
2020	3,25
2021	4,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDB melalui perbankan terus mengalami tren positif selama tahun 2017 dan 2019, akan tetapi kondisi pada 3 tahun yang berbeda (2018, 2020, 2021) mengalami penurunan disebabkan kondisi keuangan yang tidak stabil (Statistik, 2021).

Perkembangan industri perbankan pada beberapa tahun sebelumnya banyak perluasan infrastruktur fisik cabang yang didirikan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bank umum konvensional (BUK) dalam kurun waktu 2014-2015, antara lain kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor pendamping kas (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Catatan Bank Dunia dan *Global Finance Index* disebutkan bahwa dengan membaiknya bidang moneter, maka penyampaian organisasi perbankan juga harus diubah secara merata. Walaupun jumlah kantor bank, berapa banyak modal asing yang dimunculkan, dan dorongan yang diberikan telah berkembang, masih ada orang Indonesia yang tidak bergerak menuju organisasi perbankan (Jeklin, 2016).

Sektor keuangan memainkan peran penting dan merupakan mesin penggerak perekonomian yang sangat baik. Akan tetapi dalam praktiknya hal itu tidak dirasakan oleh semua gender di masyarakat. Diperkirakan 1,7 miliar orang usia kerja masih belum siap atau terlibat dalam sektor keuangan formal. Pada umumnya mereka tergolong masyarakat kelas bawah dan bekerja di sektor informal. Sehingga mereka menggunakan metode pengelolaan uang informal, seperti meminjam uang dari teman, calo utang (broker, calo), pegadaian, atau menimbunnya di dalam rumah. Sehingga seringkali tidak mencukupi, berisiko, mahal dan tidak dapat diprediksi. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam mengakses layanan keuangan telah memaksa pengusaha untuk mengandalkan tabungan yang terbatas untuk berinvestasi dan keuntungan untuk mempertahankan usahanya. Akibatnya, ketimpangan pendapatan tidak berkurang dan pertumbuhan ekonomi melambat (Supartoyo et al, 2018).

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl/90:16.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Allah swt menyeru/mengajak kita untuk menegakkan keadilan seperti tertulis dalam firman-Nya. 'Sesungguhnya Allah menyegerakan kepadamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada sesama dan Allah tidak membolehkan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Kementerian Agama R.I, n.d.).

Olehnya itu, pemerataan dan pengambilan kebijakan harus bersifat adil dan menyeluruh ke masyarakat sama halnya dengan pembangunan ekosistem keuangan di Indonesia, harus dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan tidak hanya dikhususkan kepada satu pihak (Kementerian Agama R.I, n.d.).

Efek Pengembangan sector keuangan terhadap koneksi ke pendapatan dan khususnya pendapatan masyarakat miskin melalui data tujuh puluh dua Negara pada tahun 1960-2005, Dengan metodologi studi GMM ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah memberikan ruang bagi masyarakat tertinggal. Semakin besar perkembangan sektor keuangan, semakin cepat penghasilan masyarakat tumbuh lebih cepat dari PDB (produk domestik bruto) per kapita, sehingga efek ketimpangan berkurang, meski tidak terlalu banyak. Ada sekitar 60 persen pertumbuhan di sektor keuangan yang memiliki pangsa yang sangat baik dari pertumbuhan secara keseluruhan dengan pengurangan ketimpangan pendapatan sebesar 40 persen (bolon And Nuraini, 2017).

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang dapat menghubungkan afiliasi yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Batas bank sebagai perantara terkait pada sektor keuangan dapat mengurangi biaya transaksi, pembagian risiko, dan informasi yang menipu. Mediator moneter berperan penting dalam meningkatkan batas keuangan karena mereka membantu bidang bisnis terkait keuangan dengan mengarahkan sumber daya bagi pihak-pihak yang membuka jalan masuk untuk hipotesis yang bermanfaat (Civil, 2021).

Pada dasarnya, bank juga bekerja sebagai perantara, secara eksplisit mengumpulkan sumber daya dari keseluruhan populasi sebagai toko dan mengedarkannya ke seluruh populasi sebagai kredit. Karena

banyak orang yang memahami, tidak memahami, dan menggunakan administrasi organisasi keuangan bank untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari pusat keuangan atau adanya sistem pembayaran cicilan biasa, orang enggan menggunakan akses keuangan terkait organisasi. Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam meyakinkan dan memperluas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, khususnya mengelola rekening sehingga dapat menyelesaikan problematika keuangan (Sumarni, 2021).

Kemajuan konsolidasi keuangan yang sangat cepat didorong oleh perubahan yang dipercepat dan peningkatan mekanis yang diperluas sehingga membuatnya lebih mudah dan lebih luas. Setelah membedah ukuran perkiraan cadangan spekulasi dan pembayaran di muka per kapita, menjadi salah satu pengalihan kemajuan di beberapa negara ASEAN. Setiawan (2014), Dalam dalam proses perkembangan inklusi keuangan, ia mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi mendorong penambahan perputaran uang. Sementara itu, penelitian di Indonesia tentang masalah renungan terkait uang dan peningkatan keuangan sedang dilakukan oleh Sanjaya (2015), yang meneliti dan fokus pada hubungan antara indeks inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten di salah satu provinsi Indonesia, dan ditutup dengan teori bahwa terdapat hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Siklus akses yang lancar ini dapat muncul sebagai biaya transaksi, jarak yang lebih dekat ke bank, dan potongan yang rendah yang ditetapkan oleh bank (Solihat, 2019).

Penggabungan moneter dasar untuk orang-orang dari daerah yang tertindas ini dapat membangun kecukupan pengaturan modal, yang dapat mempercepat pembangunan keuangan yang produktif, dan mengurangi hambatan untuk menerima kredit yang berharga, yang selanjutnya meningkatkan bantuan pemerintah kepada masyarakat. yang belum mencapai pelaksanaan yang memuaskan dan memiliki saran untuk mengurangi variasi upah. Padahal, di Indonesia hal itu menunjukkan sebaliknya, jumlah nasabah lembaga keuangan semakin meningkat, serta lubang gaji yang semakin besar (Setiawan, 2019).

Sebagai salah satu implementasi Indeks inklusi keuangan masing-masing kota di salah satu provinsi Indonesia yaitu Jawa Timur yang mengalami perbedaan antara wilayah kota dan kabupaten mengenai tingkat inklusi keuangan, wilayah perkotaan meningkat namun berbeda dengan kabupaten yang mengalami inklusi keuangan rendah. Melalui pemahaman atau referensi Yoo, ia berpikir bahwa pemikiran keuangan adalah pemikiran dengan menerapkan pendekatan terstruktur yang dapat digunakan untuk membantu orang menjadi bebas secara finansial dan siap untuk menangani masalah mereka sendiri. Dengan adanya inklusi keuangan dapat membantu masyarakat yang belum terlayani untuk

meningkatkan produktivitas dan pendapatannya sehingga menjadi prioritas kunci dan sarana mengurangi kemiskinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait “Konstruksi Variabel Makroekonomi Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia Tahun 2016-2020”. Dengan menggunakan metode dan sampel yang berbeda agar menjadi patokan atau pembanding untuk para peneliti selanjutnya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, digunakan dengan tujuan akhir untuk sampai pada resolusi teori yang diajukan dengan membedah informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi berupa angka, untuk menggambarkan perkembangan gini rasio, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi (pdrb), pengangguran dan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknik papan informasi yang terjadi di setiap wilayah di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Sumber informasi mendasar dari eksplorasi ini bersifat opsional informasi, yaitu informasi spesifik yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada seperti OJK, BPS, dan Bank Indonesia. (Anshori & Iswanti, 2017).

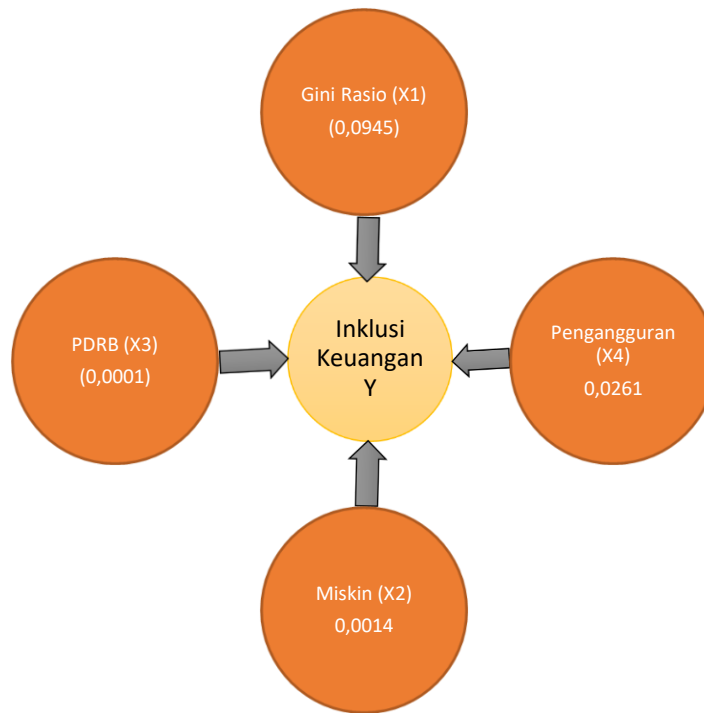
Model ekonometrika yang digunakan merupakan model analisis regresi data panel dengan pemilihan ketiga model terbaik yakni *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengolahan data menggunakan aplikasi Eviews 12. Adapun persamaan regresi data panel diuraikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y : Inklusi Keuangan
- A : Konstanta
- β_1 - β_4 : Koefisien Regresi
- X1 : Pendapatan
- X2 : Miskin
- X3 : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
- X4 : Tingkat Pengangguran Terbuka
- e : *error term*

C. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Tingkat Signifikansi X Ke Y (*Model Random Effect*)

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 12, 2022

1. Pengaruh Gini Rasio Terhadap Inklusi Keuangan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel gini rasio (X1) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila gini rasio mengalami peningkatan tidak dapat memberikan efek pergerakan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y), Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menolak H_a dan menerima H_0 .

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2019), Inklusi keuangan memiliki pengaruh positif dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Distribusi pendapatan di suatu daerah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut. Maka bisa diartikan bahwa dengan meratanya pendapatan yang ada ditengah-tengah masyarakat memberikan kekuatan bagi perbankan dengan banyaknya masyarakat yang menabung dan membantu pergerakan inklusi keuangan meingkat.

Senada penelitian Beck et al (2007), melalui penelitian tentang pengaruh peningkatan area moneter pada akses pendapatan dan pendapatan individu menggunakan informasi dari 72 negara dari tahun 1960 hingga 2005. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi waktu keseluruhan

(GMM). Studi ini menunjukkan bahwa perbaikan area moneter membantu dan mendorong pendapatan individu menjadi lebih cepat daripada perkembangan PDB per kapita, selanjutnya mengurangi disparitas dalam penyebaran pendapatan.

2. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Inklusi Keuangan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel miskin (X_2) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila penduduk miskin mengalami peningkatan maka memberikan efek penurunan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y). Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menerima H_a dan menolak H_0 .

Sama halnya dengan penelitian (Ningrum, 2018), Pada hasil pengolahan data yang dilakukan memberikan pembuktian bahwa nilai variabel yang terdapat dalam inklusi keuangan berefek negatif terhadap kemiskinan. Sehingga bentuk hipotesa yang menyatakan adanya hubungan negatif antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi diterima, dan apabila terjadinya peningkatan kemiskinan akan menurunkan inklusi keuangan di Provinsi Jawa Timur.

Meskipun demikian, berbeda dengan efek lanjutan dari eksplorasi oleh Dixit dan Ghosh (2013), masuknya administrasi moneter mungkin dapat mengangkat orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Inklusi keuangan akan membuat budaya moderasi dan memungkinkan produksi sistem angsuran yang efisien dan sederhana. Pemberian pada administrasi moneter sangat penting karena berdampak pada perubahan desain penggunaan, usaha, pengajaran, dan pengembangan yang menyeluruh (Dixit dan Ghosh, 2013).

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Inklusi Keuangan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (pdrb) (X_3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila pertumbuhan ekonomi (pdrb) mengalami peningkatan dapat memberikan efek pergerakan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y). Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menerima H_a dan menolak H_0 .

Sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Gracelia (2018), hasil penilaian memang menunjukkan bahwa file pertimbangan moneter di 33 daerah di Indonesia sangat mempengaruhi PDRB di setiap daerah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pertimbangan moneter akan mendorong peningkatan GDP di setiap wilayah ini. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pada umumnya, wilayah

dengan catatan pembayaran moneter yang tinggi akan sering memiliki tingkat perkembangan keuangan yang tinggi dan cepat.

Hal ini didukung oleh penemuan Gunawan (1998), bahwa dampak kuat bank terhadap perekonomian adalah melalui sumber daya dan jumlah bank dengan asumsi keuangan daerah terus berkembang, daerah juga akan bekerja sama dalam tabungan dan kecepatan moneter, peningkatan besar serta pembangunan moneter.

Seperti artikulasi Bank Dunia (2021), bahwa semakin tinggi penggabungan moneter daerah, semakin mereka akan menentukan pilihan dalam administrasi moneter yang tepat. Demikian juga, pilihan untuk menggunakan akses keuangan dan administrasi juga tepat. Pada akhirnya, itu akan mendukung perkembangan keuangan yang lebih luas (Sheraphim, 2018).

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Inklusi Keuangan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X_4) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dapat ditarik benangmerah apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dapat memberikan efek penurunan pula pada tingkat inklusi keuangan (Y), Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menerima H_a dan menolak H_0 .

Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018), Tingkat pengangguran yang dipublikasikan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan. Namun bersamaan dengan Penelitian yang dilakukan Khoirunnisa (2018), Dalam penelitiannya diketahui bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks inklusi inklusi keuangan di beberapa Provinsi di Indonesia dengan tren rekor pada periode 2015-2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi tingkat pengangguran maka semakin menurunkan kontribusi indeks inklusi keuangan (Khoirunnisa, 2018).

Beberapa dekade ini inklusi keuangan suatu negara terus mengalami kontribusi positif, dapat di ilustrasikan/dikaitkan apabila inklusi keuangan terus beranjak lebih baik maka akan ada penciptaan tambahan pekerjaan baru dan menandakan bagaimana inklusi keuangan terbukti akan mendorong upaya penurunan tingkat pengangguran di suatu negara terkhusus Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, juga dibangun oleh perspektif Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa pertimbangan moneter merupakan jawaban dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Indonesia saat ini. Salah satu dari enam belas ekonomi terbesar di planet ini. Padahal, jika dilihat dari PDB per kapita, Indonesia masih berada di posisi 112 dunia. Posisi Indonesia masih jauh di bawah negara-negara

tetangga. Dikombinasikan dengan pola keadaan pengangguran, kemelaratan, disparitas yang masih menjadi tugas dan tantangan bagi pemerintah Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan dalam penelitian diatas adalah Gini rasio (pendapatan) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia karena belum meratanya pendapatan dan terjadinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi. efek terhadap inklusi keuangan di Indonesia, Persentase penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dengan tersebar akses keuangan tidak hanya pada komunitas orang kaya namun masyarakat miskin pun merasakan hal itu maka dengan adanya keses ke layanan keuangan berpotensi mengangkat masyarakat miskin keluar dari siklus kemiskinan. Inklusi keuangan akan menciptakan budaya hemat serta memungkinkan terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan murah. Penyediaan akses ke layanan keuangan sangat penting karena berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, pendidikan, dan penciptaan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia, dengan bertumbuh nya sektor perekonomian memberikan ruang kekuatan pula pada akses keuangan, semakin menjulang tinggi pertumbuhan ekonomi maka inklusi keuangan juga akan membaik, kuatnya pengaruh bank terhadap perekonomian adalah melalui aset dan jumlah bank apabila perbankan terus bertambah maka masyarakat juga dimudahkan dalam menabung dan akselerasi keuangan pun baik begitupula pertumbuhan ekonomi.

dan Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa beberapa tahun ini tren rekor pengangguran terus mengalami peningkatan yang begitu sangat tinggi dan memberikan ruang inklusi keuangan juga menurun, naka diperlukan peran pemerintah agar akses perbankan dan keuangan diperluas agar masyarakat yang terdampak dalam phk dapat melakukan kedit dan membuka usaha untuk memperbaiki perekonomiannya sehingga akan memberikan peluang pengangguran menurun dan inklusi keuangan pun membaik.

E. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan berbagai stakeholder perbankan dapat menjalin Kerjasama yang baik dengan pemerintah sehingga kemiskinan dan pengangguran bisa teratasi dengan tersebar luasnya akses perbankan di daerah pelosok negeri.
- 2) Salah satu aspek yang potensial adalah dengan memanfaatkan teknologi, semoga kedepannya akan ada pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai inklusi keuangan yang mengaitkannya terhadap *finance teknologi*. Sangat diperlukan perhatian pemerintah Indonesia supaya daerah yang sulit terjangkau bisa dibantu melalui koneksi jaringan.
- 3) Pengembangan dan edukasi terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan terus digalakkan terkhususnya daerah yang terpencil dan tertinggal.
- 4) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dengan memberikan berupa tambahan vairabel yang ada dalam penelitian ini ataupun menambah periode penelitian yang bisa jadi memberikan dampak yang lebih besar bagi inklusi keuangan Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M., & Iswanti, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif.pdf* (p. Books 1-184). ISBN 979-3216-90-5
- Bank of Indonesia. (2021). *Indonesia Economic Report 2020 "Synergy to Build Optimism for Economic Recovery."* 74. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/9_LPI2020.pdf
- Brilianto, H. (2011). *G20 dan penanganan krisis global 2008*. 1–10.
- Clara SB, E. F., & Krisnawati, A. (2020). Peran Modal Sosial Sebagai Mediator Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Pada Usia Produktif Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2020.151.345>
- GPFI. (2020). *G20 2020 Financial Inclusion Action Plan. October*, 1–23.
- Graceilla Kristia Sheraphim. (2018). *Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan , Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di 33 Jurnal ilmiah Disusun oleh : Graceilla Kristia Sheraphim.*
- Jeklin, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Issue July).
- Khoirunnisa, I. (2018). Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. *Repository Institusi USU*, 1–77. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12535>
- Konstitusi. (2016). *UU NO. 9 2016*.
- Larasasati, C., & Natasya, E. D. (2017). Peran Indonesia di G-20 : Peluang dan Tantangan berlandaskan pada prinsip bebas-aktif . Visi ini menunjukkan penting bagi Indonesia , sehingga Jokowi menegaskan tujuannya tahun 2015 Jokowi juga ingin mengedepankan ekonomi Indonesia , Dalam butir pertama Na. *Jurnal Hubungan Internasional*, X(2), 42–54.

- Lionardo, J., & Rahmayanti, D. (2019). Tingkat Inklusi Keuangan Sektor Perbankan Pada Masyarakat Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 33–46. <https://doi.org/10.33369/insight.13.1.33-46>
- Marlina. (2019). *Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan dengan Pemerataan Pendapatan, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran di Indonesia*. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/23435>
- Ningrum, D. K. (2018). Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan di jawa timur periode tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1), 1–16.
- Nugroho, A., & Purwanti, E. Y. (2018). Determinan Inklusi Keuangan Di Indonesia (Global Findex 2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.1-13>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Laporan tahunan perbankan 2015*. 1–253. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Tahunan-Perbankan-2015.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2019. *Survey Report*, 1–26. www.ojk.go.id
- Ozili, P. K. (2020). Theories of Financial Inclusion. *SSRN Electronic Journal*, 1–23. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3526548>
- Setiawan. (2019). *Visi, Misi dan, Tujuan Inklusi Keuangan*. [Kajianpustaka.Com. https://www.kajianpustaka.com/2019/04/visi-tujuan-dan-strategi-keuangan.html](https://www.kajianpustaka.com/2019/04/visi-tujuan-dan-strategi-keuangan.html)
- Tampubolon, Rotua Nuraini, et al. (2017). Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia. *Responsi Bank Indonesia*, 1–76.